

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Padang dalam upaya melakukan pemulihan pascabencana banjir di Kecamatan Pauh pada Tahun 2025. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan upaya pemulihan pascabencana banjir di Kecamatan Pauh sudah menyusun strategi sesuai dengan teori inti strategi Richard P. Rumelt. Akan tetapi terdapat kendala pada proses pemulihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang yang menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan masih belum berjalan secara efektif.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti disimpulkan bahwa pada variabel diagnosis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang, situasi banjir yang terjadi di Kota Padang disebabkan oleh adanya siklon tropis senyar yang mempengaruhi intensitas hujan dan berdampak terhadap kerugian dan kerusakan pada wilayah terdampak yaitu Kecamatan Pauh. Selain itu, tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang ketidaksesuaian data penerima bantuan yang disebabkan oleh proses pendataan tidak dilakukan melalui oknum yang kompeten, sulitnya dilakukan relokasi terhadap masyarakat terdampak serta cuaca ekstrem yang terjadi secara berulang sehingga menghambat aktivitas perbaikan infrastruktur di Kecamatan Pauh.

Pada variabel kebijakan penuntun yang berguna sebagai cara dalam mengatasi tantangan yang ada pada diagnosis, kebijakan penuntun yang digunakan Oleh Pemerintah Kota Padang dalam upaya pemulihan pascabencana ialah Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P) yang disusun bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Padang. Keuntungan adanya dokumen R3P pada pelaksanaan pemulihan pascabencana banjir yaitu sebagai pedoman dan acuan bagi Pemerintah Kota Padang dalam upaya pemulihan agar pada proses pelaksanaan dapat dijalankan secara sistematis.

Selanjutnya pada variabel tindakan koheren, Pemerintah Kota Padang dalam proses pemulihan pascabencana banjir di Kecamatan pauh berisikan tindakan-tindakan yang mencakup beberapa langkah secara bertahap yang diawali dengan dilakukannya proses pendataan, pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak, pemulihan kondisi psikologis korban dilanjut dengan dilakukannya proses pembersihan material banjir, perbaikan infrastruktur, pemberian dana bantuan kepada petani, melakukan pengembalian fungsi pendidikan serta kegiatan keagamaan, serta membantu masyarakat dalam proses pengurusan surat berharga yang disebabkan oleh bencana banjir di Kecamatan Pauh. Akan tetapi berdasarkan temuan peneliti diketahui bahwa masih ditemukan beberapa langkah yang masih belum dilakukan secara maksimal oleh Pemerintah Kota Padang yaitu pemulihan aspek kemanusiaan belum dilakukan secara berkelanjutan yang menyebabkan korban terdampak pada Kecamatan Pauh masih mengalami trauma mendalam. Pada pemulihan aspek infrastruktur tanggul sementara

yang dibangun masih sering rusak dan menyebabkan kekhawatiran pada masyarakat Kecamatan Pauh. Selain itu juga masih ditemukan bahwa masyarakat dengan kondisi sawah hilang yang diakibatkan oleh banjir juga tidak mendapatkan bantuan mengenai kerugian yang diakibatkan oleh banjir dan menyebabkan hilangnya pemasukan bagi masyarakat terdampak bencana. Pemerintah Kota Padang dalam melakukan tindakan pada proses pemulihan pascabencana melakukan koordinasi dengan BPBD sebagai leading sector dalam pemulihan pascabencana dengan keterlibatan Organisasi perangkat Daerah yaitu melibatkan Kantor Kecamatan Pauh, Dinas Sosial, Dinas PUPR, BWS, dinas pertanian dan instansi terkait lainnya. Berdasarkan hasil temuan peneliti, diketahui bahwa masih terdapat tumpang tindih data dikarenakan kurangnya komunikasi antar instansi terkait yang menyebabkan sulitnya dilakukan pemulihan pascabencana banjir oleh Pemerintah Kota Padang di Kecamatan Pauh Kota Padang.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap proses pemulihan yang tidak hanya berfokus pada upaya pemulihan kerusakan fisik, namun membahas mengenai aspek sosial, ekonomi, psikologis serta adanya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah dalam memaksimalkan upaya pemulihan pascabencana. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pemulihan pascabencana memerlukan adanya diagnosis, kebijakan yang jelas serta langkah-langkah yang memerlukan koordinasi antar OPD agar pelaksanaan dapat berjalan secara optimal dalam melaksanakan upaya pemulihan pascabencana. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Padang dengan keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah dalam

memaksimalkan upaya pemulihan pascabencana serta dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kota lain dalam menyusun strategi pemulihan pascabencana sesuai dengan kondisi wilayah terdampak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada strategi pemulihan pascabencana banjir di Kecamatan Pauh. Penelitian ini belum menganalisis secara lebih lanjut mengenai efektivitas hasil pemulihan yang dilakukan Pemerintah Kota Padang terhadap masyarakat secara berkelanjutan. Maka dari itu penelitian selanjutnya dapat menganalisis lebih dalam mengenai efektivitas hasil dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam pemulihan pascabencana banjir Kota Padang secara keseluruhan.



6.2 Saran

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah diuraikan mengenai strategi Pemerintah Kota Padang dalam proses pemulihan pascabencana banjir Tahun 2025 di Kecamatan Pauh, peneliti memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Padang bersama instansi terkait perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pendataan awal bencana dengan dilakukannya pelatihan teknis dan pemberian pemahaman mengenai data yang diperlukan dalam proses pemulihan. Upaya tersebut penting dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan pendataan dan pemberian jenis bantuan kepada korban terdampak bencana
2. Pemerintah Kota Padang perlu melakukan pendekatan secara persuasif dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai manfaat dilakukannya pemindahan masyarakat ke Huntara/Huntap serta memberi pemahaman mengenai dampak bencana yang akan terjadi secara berkelanjutan untuk mengurangi risiko bencana masa mendatang.
3. Pemerintah Kota Padang perlu melakukan pelaksanaan layanan dukungan psikososial secara berkelanjutan yang tidak hanya dilakukan pada awal terjadinya bencana namun perlu dilakukan secara berkala dengan keterlibatan tenaga ahli profesional sebagai upaya mengurangi trauma bagi korban terdampak bencana.

4. Pemerintah Kota Padang perlu mengoptimalkan upaya pemulihan infrastruktur pengendali banjir seperti tanggul sungai, bendungan dan irigasi untuk mengurangi risiko terjadinya bencana di masa mendatang serta memberikan rasa aman kepada masyarakat pada wilayah terdampak banjir.

5. Pemerintah Kota Padang perlu melakukan percepatan proses pemulihan lahan pertanian terdampak banjir, terkhusus pada lahan pertanian yang hingga saat ini masih belum menerima bantuan mengenai kerugian dan kerusakan yang diakibatkan oleh banjir. Upaya ini dilakukan agar masyarakat dengan sumber pendapatan utama berasal dari pertanian tidak kehilangan sumber pendapatan secara permanen.

6. Pemerintah Kota Padang perlu memperkuat koordinasi serta komunikasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam proses pemulihan pascabencana agar mengurangi terjadinya tumpang tindih data yang dapat menimbulkan ketidakakuratan data yang dalam upaya pemulihan pascabencana.

